

ANALISIS PERKEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BATANGHARI

Elsa Febri Yenti¹, Rahma Nurjanah², Jaya Kusuma Edy³
^{1,2,3} Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi
[1elsafebriyenti0202@gmail.com](mailto:elsafebriyenti0202@gmail.com)

ABSTRACT

This study aims to analyze the development of Locally Generated Revenue (PAD), the structure of its components, and its contribution to the Regional Budget (APBD) of Batanghari Regency during the 2015–2024 period. This study uses a qualitative descriptive analysis method utilizing secondary data in the form of time series data obtained from the Batanghari Regency Central Statistics Agency (BPS), the Regional Finance Agency's APBD realization report, and various other supporting documents. The analysis was conducted on PAD targets and realizations, which consist of regional taxes, regional levies, proceeds from the management of separated regional assets, and other legitimate PAD. The results show that the development of Batanghari Regency's PAD fluctuates and is unstable. The average PAD realization only reached 67.06% of the budget target. The PAD contribution to the APBD is also relatively low, averaging 8.32%, indicating that the region's level of fiscal independence is still low and it remains dependent on central government transfer funds. The components of Regional Original Revenue (PAD), consisting of regional taxes, regional levies, proceeds from the management of separated regional assets, and other legitimate PAD, also show fluctuating developments. Based on the research findings, local governments need to optimize PAD management by increasing the effectiveness of tax and levy collection, strengthening oversight, digitizing the regional revenue system, and setting more realistic budget targets to increase PAD's contribution to the Regional Budget (APBD).

Keywords: *Regional Original Revenue (PAD), APBD, PAD contribution, Batanghari Regency*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), struktur komponen PAD, serta kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batanghari selama periode 2015–2024. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder berupa data time series yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Batanghari, laporan realisasi APBD Badan Keuangan Daerah, serta berbagai dokumen pendukung lainnya. Analisis dilakukan terhadap target dan realisasi PAD, yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan PAD Kabupaten Batanghari mengalami fluktuasi dan belum stabil. Rata-rata realisasi PAD hanya mencapai 67,06% dari target anggaran. Kontribusi PAD terhadap APBD juga masih tergolong rendah dengan rata-rata sebesar 8,32%, sehingga menunjukkan bahwa tingkat

kemandirian fiskal daerah masih rendah dan masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Komponen PAD yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah juga menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah daerah perlu meningkatkan optimalisasi pengelolaan PAD melalui peningkatan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi, penguatan pengawasan, digitalisasi sistem pendapatan daerah, serta penetapan target anggaran yang lebih realistis agar kontribusi PAD terhadap APBD dapat meningkat.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD), APBD, kontribusi PAD, Kabupaten Batanghari

A. Pendahuluan

Pembangunan daerah adalah suatu komponen penting dari pembangunan nasional dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah setempat, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta mendorong pemerataan hasil pembangunan. Seiring diberlakukannya kebijakan. Pemberian kewenangan ini membawa konsekuensi penting, yakni daerah dituntut untuk mampu mengelola keuangannya secara mandiri guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan (Adriansyah, 2017).

Dalam konteks otonomi, kemandirian keuangan daerah menjadi salah satu indikator utama keberhasilan desentralisasi fiskal. Kemandirian ini tercermin dari sejauh mana daerah mampu menggali dan mengelola PAD. PAD, Sumber penerimaan ini langsung dari potensi

ekonomi daerah, yang menjadi cerminan nyata kemampuan fiskal daerah dalam membiayai Pembangunan (Mardiasmo, 2019).

Secara ideal, semakin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah semakin berkembang pula peran PAD dibanding total penerimaan daerah. Hal ini penting karena ketergantungan yang tinggi pada alokasi dana dari pemerintah pusat, sebagai contoh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun Dana Bagi Hasil (DBH), justru dapat mengekang fleksibilitas daerah dalam menyusun program pembangunan sesuai kebutuhan lokal. Hal itu menyebabkan, analisis mengenai pertumbuhan, struktur, dan kontribusi PAD sangat sejalan untuk menilai sejauh mana suatu daerah bisa menjalankan otonomi fiskal dengan baik.(Maulana, & Sari, 2022).

Analisis pertumbuhan PAD akan memberikan gambaran mengenai

kecenderungan perkembangan penerimaan daerah dari tahun ke tahun, apakah meningkat, menurun, atau stagnan. Analisis struktur PAD diperlukan untuk melihat komposisi sumber penerimaan dan mengetahui sektor mana yang paling dominan serta mana yang masih belum digarap optimal. Sementara itu, analisis kontribusi PAD terhadap APBD menjadi indikator kunci untuk mengukur sejauh mana PAD telah menopang pembiayaan pembangunan daerah (Mahardika, & Rahmawati, 2020).

B. Metode Penelitian

Pada penelitian ini metode yang dipakai adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Batanghari, baik dari segi pertumbuhan, struktur, maupun kontribusinya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Analisis deskriptif kualitatif menekankan pada pemaparan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

a) Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batanghari

Berdasarkan tabel perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Batanghari tahun 2015–2024, diperoleh rata-rata anggaran PAD sebesar Rp154.678.714.509, sedangkan rata-rata realisasi PAD sebesar Rp103.720.843.917 dengan rata-rata persentase capaian sebesar 67,06%. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum realisasi PAD selama periode penelitian masih belum mampu mencapai target anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap keuangan daerah masih perlu dioptimalkan. Rendahnya tingkat realisasi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, seperti keterbatasan dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah, belum optimalnya pemanfaatan aset daerah, rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat, serta lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum. Selain itu, faktor eksternal seperti kondisi ekonomi nasional dan global juga turut mempengaruhi kemampuan daerah dalam mengumpulkan PAD.

**b) Struktur Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Batanghari**

a. Pajak Daerah

Pajak daerah Kabupaten Batanghari tahun 2015–2024, diperoleh rata-rata anggaran sebesar Rp54.932.520.592, sedangkan rata-rata realisasi sebesar Rp26.076.157.417 dengan rata-rata persentase capaian sebesar 47,46%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak daerah selama periode penelitian masih jauh di bawah target anggaran yang telah ditetapkan. Rata-rata capaian sebesar 47,46% menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan pajak daerah masih tergolong rendah karena realisasi yang diperoleh bahkan belum mencapai setengah dari target yang direncanakan. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan yang cukup besar antara target dan realisasi penerimaan pajak daerah setiap tahunnya. Rendahnya capaian tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti penetapan target yang terlalu tinggi, belum

optimalnya sistem pemungutan pajak daerah, rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, lemahnya pengawasan, serta belum maksimalnya pemanfaatan potensi pajak daerah yang dimiliki Kabupaten Batanghari.

b. Retribusi daerah

Retribusi daerah Kabupaten Batanghari tahun 2015–2024, diperoleh rata-rata anggaran sebesar Rp13.832.715.322, sedangkan rata-rata realisasi sebesar Rp7.445.314.890,61 dengan rata-rata persentase capaian sebesar 53,82%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan retribusi daerah selama periode penelitian masih belum mampu mencapai target anggaran yang telah ditetapkan secara optimal. Rata-rata capaian sebesar 53,82% mengindikasikan bahwa efektivitas pengelolaan retribusi daerah masih tergolong rendah karena realisasi penerimaan hanya mencapai sekitar setengah dari target yang direncanakan. Kondisi ini menunjukkan

adanya perbedaan yang cukup besar antara target dan realisasi penerimaan retribusi daerah setiap tahunnya.

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Rata-rata persentase realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Batanghari selama periode 2015–2024 mencapai 92,71%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan pendapatan daerah dari sektor ini berada pada kategori cukup efektif. Dengan demikian, pemerintah daerah perlu mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan penyertaan modal daerah agar kontribusi pendapatan dari sektor ini dapat terus meningkat dan mendukung kemandirian fiskal daerah secara berkelanjutan

d. Lain-lain PAD yang sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah Kabupaten Batanghari tahun 2015–2024, diperoleh rata-rata anggaran sebesar

Rp92.436.256.163,76, sedangkan rata-rata realisasi sebesar Rp60.471.468.245,75 dengan rata-rata persentase capaian sebesar 65,41%. Rata-rata capaian sebesar 65,41% menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan lain-lain PAD yang sah masih tergolong cukup, namun belum optimal. Realisasi penerimaan hanya mencapai sekitar dua pertiga dari target yang direncanakan.

c) Kontribusi PAD Terhadap APBD Kabupaten Batanghari

Secara keseluruhan, struktur PAD Kabupaten Batanghari masih didominasi oleh lain-lain PAD yang sah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah agar struktur PAD menjadi lebih seimbang dan tingkat kemandirian fiskal daerah dapat meningkat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat peningkatan pada total APBD Kabupaten Batanghari, realisasi PAD belum mampu mengimbangi pertumbuhan tersebut secara optimal.

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal daerah masih relatif rendah. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis untuk meningkatkan PAD, antara lain melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pemanfaatan potensi ekonomi daerah secara maksimal.

D. Kesimpulan

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Batanghari selama periode 2015–2024 menunjukkan kondisi yang fluktuatif dan belum stabil. Berdasarkan hasil analisis, rata-rata tingkat efektivitas realisasi PAD hanya mencapai 67,06%, yang menunjukkan bahwa target pendapatan belum mampu dicapai secara konsisten setiap tahunnya. Meskipun pada beberapa tahun tertentu realisasi PAD mampu melampaui target, seperti pada tahun 2017 dan 2021, namun pada tahun-tahun lainnya masih terdapat selisih yang cukup besar antara anggaran dan realisasi. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batanghari selama periode penelitian masih tergolong rendah. Berdasarkan hasil

analisis, rata-rata kontribusi PAD terhadap total APBD hanya sebesar 8,32%. Persentase tersebut menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan melalui sumber pendapatan asli daerah masih terbatas, sehingga ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih cukup tinggi. Meskipun kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 11,84%, namun secara keseluruhan kontribusi PAD belum menunjukkan peningkatan yang signifikan dan konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriansyah, M. A. (2017). Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Banjar. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 17(1), 45–56.
- Mahardika, A., & Rahmawati, D. (2020). Analisis Struktur Pendapatan Asli Daerah dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi Daerah*, 8(1), 34–47.
- Mardiasmo. (2019). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi. Yogyakarta
- Maulana, R., & Sari, P. (2022). Kontribusi PAD terhadap APBD dalam Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 13(3), 201–214.